

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Komunikasi Politik

Ilmu komunikasi politik lahir saat dimana adanya gabungan pada dua ilmu yakni ilmu politik dan ilmu komunikasi, dimana kegiatan komunikasi yang menjurus terhadap sifat-sifat politik bisa disebut komunikasi politik tanpa adanya komunikasi politik masyarakat tidak akan sulit menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat terhadap elit atau penguasa. Sehingga sangat penting masyarakat memiliki pengetahuan tentang komunikasi dan politik agar dikemudian hari fungsi dari sistem perpolitikan pun dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan bernegara. Selain itu, Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, dimana tiga konsep yang harus selalu dianut, atas nama rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, selalu berada di garda depan kehidupan politik.

Secara umum komunikasi menurut Dan Nimmo dalam Efriza dan Jerry Indrawan (2018) adalah proses interaksi sosial di mana orang membangun makna yang merupakan sebagai citra mereka menuju dunia (tempat mereka bertindak) dan bertukar citra dalam simbol tertentu. Sementara itu, pengertian terminologi komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian yang dikatakan oleh seseorang terhadap orang lain. Carl I. Hovland dalam Efriza dan Jerry Indrawan (2018) menambahkan bahwa pengertian komunikasi

sebagai proses komunikasi bertujuan untuk memberikan stimulus, biasanya berupa simbol-simbol linguistik. (*verbal dan nonverbal*) sehingga terjadi perubahan tingkah laku terhadap penerima karena proses yang dilakukan oleh seorang komunikator dan dapat mempengaruhi juga terhadap orang lain.

Kenapa komunikasi politik dapat disebut sebagai pengaruh individu terhadap pandangan politik individu lainnya, karena saat melakukan proses komunikasi pada dasarnya memuat interaksi yang kemudian dapat mempengaruhi suatu pandangan politik seseorang. Menurut Astrid S. Susanto dalam Efriza dan Jerry Indrawan (2018:10) menyatakan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi, agar subyek yang ditangani oleh jenis komunikasi ini menghubungkan seluruh warganya, sehingga melalui komunikasi politik masyarakat sosial menyatu dengan negara dan sebagai dimensi politik agar masyarakat memiliki kesadaran dalam berhubungan bernegara antar makhluk sosial.

Komunikasi politik merupakan proses dimana menyampaikan informasi mengenai politik terhadap seseorang komunikasi ini bukan berarti untuk mempengaruhi oleh seseorang politikus pada saat akan melakukan kampanye saja melainkan dapat dijadikan alat untuk pendidikan politik, sosialisasi politik, partisipasi politik terhadap seseorang, pertukaran informasi mengenai politik dari individu-individu maupun dari kelompok terhadap individu dengan sasaran

yang jelas mengenai politik terhadap masyarakat sehingga nantinya masyarakat sendiri tidak buta akan tentang politik yang selama ini di masyarakat sendiri politik itu memiliki arti yang macam-macam yang bersifat negatif karna melihat dari satu pandangan yang terjadi di media-media berita di Indonesia yang memperlihatkan betapa buruknya sistem-sistem politik di lapangan sehingga diperlukannya komunikasi politik yang baik sebagai bentuk pendidikan dibalik sistem politik yang baik dan sehat sebagaimana komunikasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2008:24) yakni komunikasi politik ialah penentu elemen dinamis dan menjadi bagian dari sebuah sistem politik yang terdiri dari sosialisasi, partisipasi dan rekrutmen politik. Sehingga komunikasi politik merupakan elemen penting sebagai bentuk penyampaian pendidikan politik yang baik bagi masyarakat indonesia agar masyarakat dapat memiliki pemahaman tentang politik yang sama.

Dalam komunikasi politik tidak lepas dari apa itu sistem politik menurut Almond dan Powell dalam Efriza dan Jerry Indrawan (2018:46) dikatakan bahwa sistem politik yakni sistem yang berfungsi dari beberapa interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang merdeka yakni dapat melaksanakan fungsi integrasi dan adaptasi internal/eksternal, sehingga dapat menjadi sebuah ancaman maupun paksaan. Ada delapan fungsi dari sistem politik yakni 1. Fungsi Sosialisasi; 2. Fungsi Rekrutmen Politik; 3. Fungsi Artikulasi

Kepentingan 4. Fungsi Agregasi Kepentingan; 5. Fungsi Komunikasi Politik; 6. Fungsi Pembuatan Kebijakan; 7. Fungsi Pelaksana Kebijakan; 8. Fungsi Penghakiman Kebijakan.

Tujuan komunikasi politik juga yakni sebagai bentuk agar menjadikan partisipasi politik masyarakat ini menjadi meningkat dan serta berperan aktif dalam kegiatan politik (partisipasi politik) (Anwar Arifin, 2006: 11) salah satunya bentuk dari partisipasi politik masyarakat yakni turut berperan aktif untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dapat disebut partisipasi politik dan ikut menjadi relawan pemilihan yang dapat menambah wawasan masyarakat terkait system politik yang ada.

2.1.2 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan wadah untuk mempengaruhi tindakan warga negara dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik serta berpartisipasi dalam pengangkatan kepala pemerintahan. Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan antara warga dan negara dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Mengutip Ramlan Surbakti dalam Muhammad Fadli (2010) dalam partisipasi politik yang tinggi pun dapat merupakan hasil yang baik bagi keberlangsungan politik masyarakat mengapa demikian karena level yang baik demokrasi di suatu pemilu diukur dengan bagaimana antusiasnya warga terhadap ajang pemilu tersebut.

Dalam kehidupan berpolitik diperlukan seseorang atau sekelompok orang yang berperan aktif sebagai warga negara mestinya dan sering ikut serta dalam kehidupan politik yang ada termasuk memilih kepala negara. Dan secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan publik, menghubungi atau melobi pejabat pemerintah atau anggota parlemen, bergabung pemerintah sebagai anggota partai atau gerakan sosial dengan tindakan langsung, dan lainnya (Budiarjo, 2015: 367).

Menurut Herbert McClosky dalam Budiarjo (2015:367) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga negara yang melaluinya mereka ikut serta dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik. Karena dalam proses partisipasi dalam sistem demokrasi yakni dengan lebih banyak partisipasi masyarakat akan cenderung lebih baik, karna didalam tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga/masyarakat mengikuti dan memahami terkait masalah politik terbalik dengan situasi masyarakat yang cenderung rendah dalam partisipasi ini pada umumnya dapat dianggap sebagai tanda yang kurang baik karena dapat ditafsirkan masyarakat tidak menaruh perhatiannya dalam masalah kenegaraan dan hanya melayani kepentingan pribadi dan golongannya saja (Budiarjo, 2015:369).

Di Indonesia sendiri khususnya dalam jalannya perpolitikan di sebuah desa biasa akan melakukannya partisipasi politik secara politik kolektif karena dalam suatu desa ataupun lingkungan masyarakat lainnya cenderung memiliki masalah sosial yang sama sehingga biasanya masyarakat melakukan proses politik yakni dengan kontrak politik dengan salah satu calon kandidat dalam pemilu. Dimana dengan sistem kolektif ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

2.1.2.1 Kriteria Partisipasi Politik

Beberapa kriteria dimaksud dalam partisipasi bukan hanya orang-orang yang mengikuti ajang politik ini dengan menjadikannya sebagai calon dalam pemilihan namun partisipasi politik yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Mengenai kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat objektif dan tidak subjektif.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perseorangan sebagai warga negara biasa yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
3. Kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa persuasi maupun berupa tekanan bahkan penolakan terhadap kehadiran tokoh-tokoh aktor politik dan pemerintahan.

4. Kegiatan tersebut diarahkan pada upaya untuk mempengaruhi pemerintah tanpa memedulikan akibat yang akan timbul jika gagal atau berhasil.
5. Kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) atau dengan cara di luar prosedur yang wajar (tidak konvensional) dan berupa kekerasan (kekerasan).

2.1.2.2 Bentuk Partisipasi Politik

Menurut pandangan Ramlan Subakti, Partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua kategori : partisipasi aktif dan pasif

a. Partisipasi Aktif

Merupakan aktivitas masyarakat dalam negeri dimana memiliki tujuan untuk ikut pada sebuah penentuan kebijakan dalam pemilihan penyelenggara untuk kepentingan bersama.

b. Partisipasi Pasif

Yakni aktivitas sipil yang mendukung fungsi negara untuk menciptakan kesesuaian dengan tujuan, jenis partisipasi ini meliputi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan penerapan kebijakan pemerintah.

mengacu Paige dalam Cholisin (2007:153) tingkat kesadaran politik dan kepercayaannya terhadap pemerintah, Sistem politik telah membagi menjadi empat macam tingkatan kesadaran politik yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan

radikal, dan partisipasi pasif. Bentuk partisipasi politik juga dibagi dalam dua bentuk partisipasi menurut Almond dalam Mohtar Mas'ood (2011:57-58) dua bentuk yaitu partisipasi politik yakni konvensional dan non konvensional. Adapun beberapa partisipasi menurut Almond:

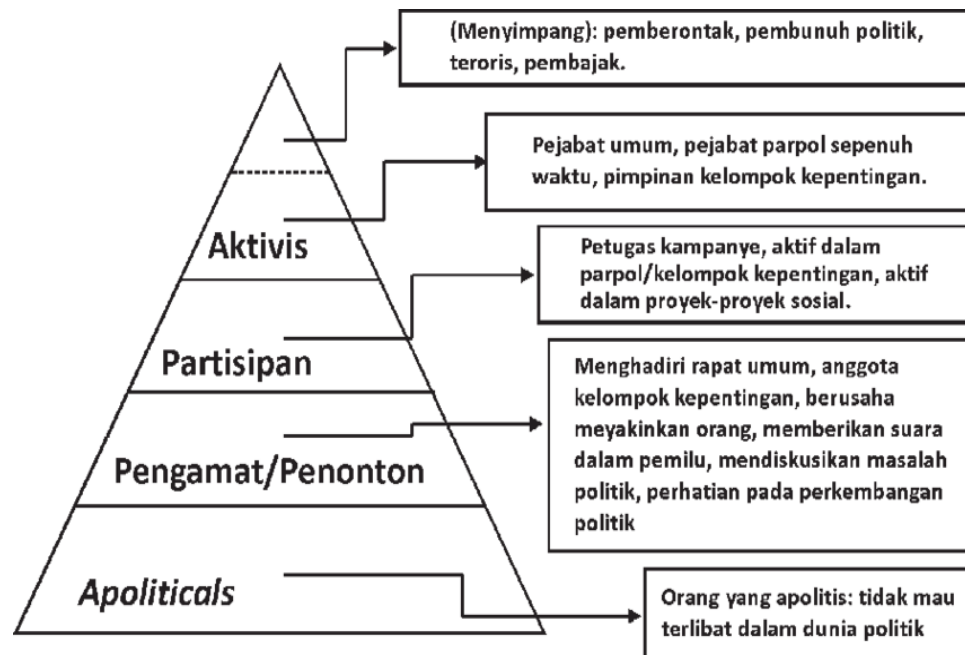
a. Partisipasi politik konvensional

- Pemberian suara atau *votting*
- Mengikuti kegiatan kampanye
- Komunikasi antara individu dengan pejabat politik
- Ikut berdiskusi politik
- Bergabung serta membuat kelompok kepentingan

b. Partisipasi politik non konvensional

- Mengikuti demo
- Adanya mogok kerja
- Ikut mengajukan sebuah petisi
- Konfrontasi
- Melakukan kekerasan politik terhadap manusia:
seperti melakukan penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi
- Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda:
seperti pengrusakan, pemboman, dan pembakaran.

Gambar 2.1



Sumber: David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976)

Berikut ini penjabaran atau pengertian tingkatan piramida pada gambar di atas menurut David F. Roth dan Frank Wilson (1976) dimulai pada bagian bawah piramida partisipasi politik yaitu terdapat sekelompok ataupun individu yang sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun dapat disebut sebagai kelompok apolitis. Tingkatan selanjutnya yakni terdapat individu atau kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum partai politik, membahas politik, mengikuti perkembangan melalui media, dan memberikan suara dalam pemilu. Kemudian di atas kelompok pengamat yaitu kelompok peserta. Kelompok-kelompok ini seringkali terlibat langsung, sebagai manajer kampanye, anggota partai aktif dan peserta dalam proyek

sosial. Kemudian kelompok yang berada di puncak piramida adalah kelompok aktivis warga negara yang tergabung dalam kelompok ini relatif sedikit, mereka adalah pengurus tetap partai, pimpinan partai atau pelobi.

2.1.2.3 Fungsi Partisipasi Politik

Adapun 4 fungsi partisipasi politik menurut Robert Lane dalam Suharno (2004:107) menjelaskan bahwa fungsi partisipasi politik dapat dibagi menjadi 4 yakni:

- a. Partisipasi merupakan bentuk sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi;
- b. Kemudian partisipasi sebagai pemuas kebutuhan penyesuaian sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan harga diri, peningkatan status sosial, dan perasaan terhormat karena dapat bergaul dengan para pejabat terkemuka dan penting;
- c. Partisipasi juga dapat menjadi nilai-nilai khusus masyarakat dalam politik karena politik dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu seperti mendapatkan pekerjaan, proyek, dan memperlancar karir bagi para pejabat.
- d. Partisipasi merupakan sebagai pemenuhan kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu, yaitu dapat terlibat dalam bidang politik merupakan bentuk

untuk memenuhi kebutuhan psikologis tertentu seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, perasaan yang menjadikan dirinya sebagai tokoh penting dan juga dapat dihargai oleh orang lain dan kepuasan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sahid (2011:184) Partisipasi politik juga memiliki tugas untuk pemerintah, tugas ini termasuk misalnya. mempromosikan program pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat mendukung program politik dan pemerintah.

- a. Melarang kepentingan rakyat sebagai lembaga seperti kontribusi pemerintah dalam mengarahkan dan memperkuat pembangunan.
- b. Memberikan masukan, saran dan kritik kepada pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

2.1.2.4 Faktor Pengaruh Partisipasi Politik

Mempengaruhi seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik menurut Frank Lindenfield dalam Sahid (2011) motivasi seseorang untuk melakukan tindakan politik adalah pengaruh dalam kepuasan ekonominya, menurutnya status ekonomi yang rendah dapat membuat seseorang merasakan keterasingan dari kehidupan politik dan orang tersebut dapat menjadi apatis begitu pula sebaliknya.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) faktor Yang mempengaruhi pertama adalah kesadaran akan tempat seseorang di dunia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan inti dari kesadaran politik. Perlindungan politik, ekonomi, dan hukum hanyalah beberapa contoh dari berbagai jenis hak yang dimiliki orang. Faktor kedua ialah tentang bagaimana kebijakan pemerintah dan implementasi pemerintah akan dinilai pada akhirnya dan diapresiasi. Penilaian ialah seperangkat keyakinan tentang apakah otoritas publik dapat dipercaya atau tidak dan terlepas dari apakah otoritas publik akan terpengaruh. Artinya, jika mereka melihat bahwa otoritas publik tidak dapat dipengaruhi dalam interaksi dinamis politik, dukungan dinamis mereka tidak akan ada habisnya.

Adapun empat faktor seseorang terpengaruhi menurut Milblas (Maran, 2001: 156) Pertama, individu perlu mengambil kepentingan dalam hidup karena dukungan. Yang kedua adalah akibat langsung dari kualitas individu itu sendiri. Ketiga, elemen sosial individu. Keempat, komponen keadaan politik atau iklim yang sebenarnya. Selanjutnya Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam Sahid (2013) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya tingkat partisipasi politik dalam suatu masyarakat adalah civic culture dimana faktor ini

merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pilihan seseorang karena beberapa masyarakat di Indonesia sendiri masih memegang erat budaya yang sebelumnya telah ada dimana biasanya rakyat akan mengikuti apa yang dikatakan sesepuh atau tokoh masyarakat yang ada karena pilihan tokoh dianggap sebagai pilihan yang terbaik bagi semua pihak.

2.1.3 Konsep Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal yakni Pemilihan Bupati apabila dilaksanakan di Kabupaten merupakan suatu wujud nyata dari jalannya sistem demokrasi dimana pilkada merupakan tempat atau ajang pentas demokrasi untuk memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerah setempat untuk 5 tahun kedepan dan menjadi instrumen bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Dalam pilkada, kedaulatan rakyat telah diwujudkan sebagai perwujudan hak politik dasar rakyat, bahkan dapat melakukan pergantian pemerintahan dalam pilkada pasca konflik secara aman, damai, dan sesuai aturan, serta menjamin kelangsungannya dari pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang mengatur tentang jalannya pilkada yang meliputi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah ini menjadi peraturan yang harus ditaati oleh semua masyarakat sebagai peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia agar proses demokrasi yang ada ini tidak dipermainkan oleh

orang-orang tidak bertanggung jawab yang dapat membuat sebuah pemerintahan tidak menjadi sesuai dengan kehendaknya.

Sanit (1993) mengatakan bahwa dalam Proses penyelenggaraan pemilu dapat berdampak langsung pada pembentukan budaya politik, karena publik yang berpengalaman langsung menginternalisasikan perilaku pesaing dan penyelenggara pemilu, serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan informasi.

Dalam upaya mengatur jalannya Pilkada yang mengatur Tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dan terbuka ini diperlukannya panitia/penyelenggara yang bertugas sebagai sebuah lembaga yang independen dan netral sehingga dibentuklah KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelenggara setiap pemilu yang ada di seluruh Indonesia dalam pelaksanaannya KPU bertugas menjadi penyelenggara sehingga berjalan dengan lancar dan dapat di pertanggung jawabkan kembali ke masyarakat dan BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertugas sebagai badan yang mengawasi jalannya pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berhak memberikan sanksi kepada para peserta apabila dinyatakan bersalah dalam pemilu.

2.1.4 Konsep Persepsi

Persepsi merupakan proses sangkut pautnya dengan kehidupan manusia dimana ini menyangkut elemen kognitif manusia seperti masuknya informasi-informasi yang sebelumnya tidak diketahui sehingga dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, menurut Rajcecki dalam Ruslan Rosady (2010:68-70) adapun terdapat faktor-faktor lain yang harus diketahui seperti terbentuknya opini dimana opini merupakan hasil dari persepsi dan sikap seseorang karena faktor tersebut dapat membentuk opini yang terbentuk melalui persepsi dan sikap seseorang.

Persepsi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor pendekatan seperti:

1. Pendekatan Sosiologis

Pada dasarnya didalam karakteristik dan pengelompokan sosial itu mempunyai beberapa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pilihan seseorang didalam pemilu, Haryanto dalam Lembaga Strategis Nasional (2014) berpendapat bahwa pendekatan sosiologis dapat memperlihatkan apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat karna didalam nilai-nilai sosiologis cenderung menempel pada masing-masing individu seseorang untuk mempengaruhi perilaku seseorang dalam politik. Nilai-nilai sosiologis tersebut muncul berupa agama, kelas sosial, etnis, daerah, tradisi, keluarga dan lain-lain.

2. Pendekatan Psikologis

Dalam pendekatan psikologis dapat menjelaskan beberapa faktor yang menjadi keterikatan ataupun dorongan psikologis seseorang terhadap pandangan politik seseorang didalam proses pemilu ataupun dalam orientasi politiknya kedepan, dimana ini mengacu juga dengan bagaimana yang dilakukan oleh lembaga survei politik dimana peran lembaga ini merupakan tempat jajak pendapat dimana dari sebuah survei yang dilakukan lembaga survei bermunculan pengetahuan baru terhadap masyarakat seperti partai politik, tokoh politik, sampai elektabilitas elit.

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini biasanya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yakni masyarakat tak lebih seperti konsumen yang sedang memaksimalkan manfaat yang didapat merupakan contoh perilaku masyarakat yang rasional dimana apabila mendapatkan keuntungan maka si pemberi keuntungan memiliki timbal baliknya juga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya yang menjadi bahan referensi analisis dan pengkajian oleh peneliti selanjutnya karna fokus pada penelitiannya hampir mendekati apa yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebuah referensi penulis:

2.2.1 Pengaruh publikasi lembaga survei terhadap perilaku pemilih (studi pada pilkada kabupaten pringsewu 2017) Penelitian ini dilakukan oleh Beny Iswanto, Jurusan Ilmu Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian analisis kuantitatif melalui pendekatan psikologis, sosiologis, dan rasional. Dalam penelitian tersebut setelah melakukan beberapa uji didapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh atau hubungan antara publikasi lembaga survei terhadap perilaku pemilih. Dari data angket yang sudah disebar ke masyarakat hanya media televisi sebagai sumber berita masyarakat tanpa ada media lain seperti koran dan berita online, dan berita mengenai publikasi lembaga survei dalam pilkada Kabupaten Pringsewu pun tidak tersedia di televisi. Perilaku pemilih lebih condong akibat pengaruh lain seperti faktor dari partai politik, tim sukses kandidat, politik uang (*money politics*) dan pada saat kampanye yang dilakukan oleh para kandidat calon. Sedangkan

pengaruh dari lembaga survei cenderung kepada pemahaman politik masyarakat terhadap calon kandidat yang sering ditemukan di televisi.

2.2.2 Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari

Penelitian ini dilakukan oleh Tyas Fatharani, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif melalui berlandaskan pada filsafat positivisme. Dalam penelitian tersebut setelah melakukan beberapa uji didapatkan hasil bahwa Pengaruh pendidikan politik terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur jawa barat 2018 di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari dari data yang diperoleh dari kuesioner masih rendah. Dari data angket yang sudah disebar ke masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan politik berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambaran kerangka teoritis penelitian yang akan penulis uraikan lakukan sebagai berikut : variabel bebas (X) yaitu pengaruh hasil survei elektabilitas calon bupati. Sedangkan variabel dependen (Y) yaitu partisipasi politik masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian sampai dibuktikan dengan hasil data yang diperoleh atau dikumpulkan. Penelitian ini mengajukan hipotesis yakni bagaimana pandangan dari masyarakat terhadap lembaga survei politik dan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilu.

2.4.1 $H_0 : \rho = 0$: Tidak terdapat hubungan antara pengaruh hasil survei elektabilitas calon bupati terhadap partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya.

2.4.2 $H_1 : \rho \neq 0$: Terdapat hubungan antara pengaruh hasil survei elektabilitas calon bupati terhadap partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya.